

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Teori**

##### 2.1.1. Tata Kelola Perusahaan

###### 2.1.1.1. Definisi Tata Kelola Perusahaan

Menurut *Organization for Economic Corporation and Development* (OECD) yaitu sebagai sebuah struktur untuk menetapkan tujuan perusahaan, saran untuk mencapai tujuan tersebut serta menentukan pengawasan atas kinerja perusahaan. Tata Kelola Perusahaan merupakan mekanisme pengendalian untuk mengatur dan mengelola perusahaan dengan maksud untuk meningkatkan kemakmuran dan akuntabilitas perusahaan yang tujuan akhirnya untuk menunjukkan *shareholders value* (Nuryaman, 2009).

Suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan struktur, prosedur dan mekanisme yang dirancang untuk pengelolaan perusahaan dengan berlandaskan prinsip akuntabilitas yang dapat meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang (Velnampy, 2013). Sistem tata kelola perusahaan mengarah kepada sebuah kumpulan peraturan dan dorongan yang digunakan pihak manajemen untuk mengarahkan dan mengawasi jalannya kegiatan perusahaan. Oleh karena itu, tata kelola perusahaan yang baik dapat memperbesar kesempatan untuk meningkatkan keuntungan dan nilai perusahaan secara jangka panjang bagi para pemegang saham (Onasis, 2016).

###### 2.1.1.2. Prinsip Tata Kelola Perusahaan

Menurut Agoes (2011), prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yaitu :

###### a. Prinsip perlakuan yang setara antar pemangku kepentingan (*fairness*)

Prinsip agar para pengelola memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan setara, baik pemangku kepentingan primer (pemasok, pelanggan, karyawan, pemodal) maupun pemangku kepentingan sekunder

(pemerintah, masyarakat dan yang lainnya). Hal inilah yang menyebabkan munculnya konsep *stakeholders* (pemegang saham saja).

b. Prinsip Transparansi

Kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam penyampaian informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar dan tepat waktu.

c. Prinsip Akuntabilitas

Prinsip dimana para pengelola berkewajiban untuk membina sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan (*financial statements*) yang dapat dipercaya.

d. Prinsip Responsibilitas

Prinsip dimana pengelola wajib memberikan pertanggungjawaban atas semua tindakan dalam mengelola perusahaan kepada para pemangku kepentingan sebagai wujud kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Menurut pedoman umum Corporate governance Indonesia yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) tahun 2008, prinsip-prinsip tersebut meliputi 5 aspek, yaitu :

a. Tranparansi (*Tranparency*)

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan suatu bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang bersifat material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh perundang undangan saja akan tetapi juga beberapa hal terkait dengan pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikeola dengan benar oleh pihak yang terkait seperti manajemen, akan tetapi hal itu harus mempertimbangkan akan kebutuhan pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lain.

Akuntabilitas merupakan syarat dasar agar mencapai kinerja yang berkesinambungan.

c. *Responsibilitas (Responsibility)*

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar terpelihara kesinambungan usaha jangka panjang.

d. *Independensi (Independency)*

Demi terlaksananya asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing masing dari organ perusahaan tidak saling mendominasi atau tidak ada intervensi dengan pihak yang lain.

e. *Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)*

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaran.

2.1.1.3. *Manfaat Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance)*

Menurut Mardiansya dalam Wardani (2012) dengan adanya penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) dalam suatu perusahaan akan menghasilkan beberapa manfaat yang akan diperoleh, yaitu :

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dengan lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *shareholder*.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.
3. Meningkatnya nilai saham perusahaan sehingga dapat lebih meningkatkan citra perusahaan kepada publik lebih luas dalam jangka panjang.
4. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Menurut *forum of corporate governance in Indonesia* (FCGI) penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) akan menghasilkan beberapa manfaat yang akan diperoleh, yaitu :

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya pengambilan keputusan yang baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder*.
2. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan dan sekaligus akan meningkatkan *stakeholder value* dan *dividen*.

#### 2.1.1.4. Tujuan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*)

Adapun Tujuan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) adalah sebagai berikut :

1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.
2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota *stakeholder* non pemegang saham.
3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dewan pengurus atau *Board of Directors* dengan manajemen senior perusahaan.

#### 2.1.1.5. Mekanisme Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*)

##### a. Komite Audit

Komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Keberadaan komite audit sangat penting bagi perusahaan, selain itu komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian. Dalam Pedoman GCG Indonesia (KNKG, 2008) dijelaskan bahwa, Komite Audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

1. struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku.
2. tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/ POJK. 04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit. Adapun persyaratan menjadi anggota komite audit, tugas komite audit dan wewenang komite audit adalah sebagai berikut :

a. Syarat menjadi anggota Komite Audit :

1. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik, proses audit, manajemen resiko dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya.
3. Wajib memiliki paling sedikit 1 anggota yang berlatarbelakang pendidikan dan keahlian dibidang akuntansi dan keuangan.
4. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris, anggota direksi, pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik.

b. Tugas Komite Audit :

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan emiten atau perusahaan publik kepada public dan pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan emiten atau perusahaan publik.
2. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan emiten atau perusahaan publik.
3. Melakukan penelaahan terhadap pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh direksi, jika emiten atau perusahaan publik tidak memiliki fungsi pemantau resiko dibawah dewan komisaris.

4. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan emiten atau perusahaan publik.

c. Wewenang Komite Audit :

1. Mengakses dokumen, data dan informasi emiten atau perusahaan publik tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen resiko dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab komite audit.
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota komite audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan)
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

d. Dewan Komisaris

Dewan komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance*. Namun dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil kegiatan operasional.

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007, pada pasal 108 ayat (5) dijelaskan bahwa bagi perusahaan berbentuk perseroan Terbatas, maka wajib memiliki paling sedikitnya 2 (dua) anggota Dewan Komisaris. Dewan Komisaris terdiri dari komisaris independen dan komisaris non independen. Komisaris independen merupakan komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi, sedangkan komisaris non-independen merupakan komisaris yang terafiliasi. Yang dimaksud dengan terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Mantan anggota direksi dan dewan komisaris yang terafiliasi serta karyawan perusahaan, untuk jangka waktu tertentu termasuk dalam kategori terafiliasi (KNKG, 2006). Komisaris Independen diatur dalam peraturan 12 BAPEPAM No: KEP-315/BEJ/06-2000 yang disempurnakan dengan keputusan No:KEP-339/BEJ/07-2001 yang menyatakan bahwa setiap perusahaan publik wajib memiliki komisaris independen untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik.

Dewan komisaris independen merupakan pihak yang tidak diperkenankan memiliki hubungan apapun yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan. Pembentukan dewan komisaris independen diharapkan akan melindungi pemegang saham. Setidaknya jumlah komisaris independen dalam perusahaan adalah 30% dari seluruh anggota komisaris. Komisaris independen diukur dari presentase jumlah anggota komisaris dari luar perusahaan dari seluruh jumlah dewan komisaris (Ujiyantho dan Pramuka, 2007:10) dalam Rimardhani, dkk (2016).

#### 2.1.1.6. Unsur-unsur Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*)

Menurut Sutedi (2011), unsur-unsur dalam Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) yaitu :

##### 1. Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) – internal Perusahaan.

Unsur-unsur yang berasal dari dalam perusahaan yaitu :

- a. Pemegang saham
- b. Direksi
- c. Dewan Komisaris
- d. Manajer
- e. Karyawan
- f. Sistem remunerasi berdasar kinerja
- g. Komite audit

#### 2.1.2. Teori Legitimasi

Teori legitimasi adalah suatu teori yang digunakan oleh suatu perusahaan beroperasi dengan izin dari masyarakat, dimana teori ini dapat ditarik apabila masyarakat menilai bahwa perusahaan tidak melakukan hal-hal yang diwajibkan kepadanya. Legitimasi sangat penting bagi perusahaan, mengingat keberadaan perusahaan berada di lingkungan sosial atau komunitas sosial yang harus berinteraksi dengan masyarakat di lingkungan perusahaan. Hal ini juga berkaitan dengan kelangsungan perusahaan sendiri. Menurut Luthfia (2012) teori legitimasi adalah sebuah teori yang digunakan oleh sebuah organisasi secara

berkesinambungan akan melakukan operasi sesuai dengan batas – batas dan nilai yang diterima oleh masyarakat disekitar perusahaan dalam usaha.

Legitimasi merupakan konsep penting bagi organisasi, karena dapat berkontribusi pada keberhasilan organisasi. Untuk mendapatkan legitimasi, organisasi dalam berperilaku perlu melakukan penyesuaian terhadap nilai, norma, aturan dan kepercayaan yang berlaku di masyarakat (Blanco - González, 2013). Tanpa legitimasi, akan ada timbulnya potensi risiko berkurang atau hilangnya dukungan para pemangku kepentingan yang dapat menyulitkan organisasi dalam menjalankan usahanya.

### 2.1.3. Teori Pemangku Kepentingan

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat keinginan yang berkembang dalam etika bisnis dan pada kenyataannya, teori stakeholder adalah salah satu teori yang paling berpengaruh dalam etika bisnis. Untuk melakukan bisnis, perusahaan telah menuntut sumber daya dari lingkungan alam dan sebagai imbalannya, perusahaan harus memperlakukan dan mengelola lingkungan dengan baik (Aggarwal, 2013).

Menurut Akisik (2017) teori pemangku kepentingan berbeda dari teori legitimasi yang memperlakukan seluruh masyarakat sebagai satu kelompok. Keterlibatan mereka yang erat dalam perusahaan-perusahaan ini dapat menghasilkan kekuatan dan pengaruh yang luar biasa terhadap pengambilan keputusan perusahaan, terutama ketika investor menuntut perusahaan untuk bertindak dengan cara yang lebih bertanggung jawab secara sosial. Semakin banyak saham yang dimiliki oleh para investor ini, semakin besar kekuatan dan kontrol yang mereka hasilkan dalam suatu perusahaan yang dapat menyebabkan perubahan signifikan dalam perusahaan.

### 2.1.4. Laporan Berkelanjutan (*Sustainability Report*)

Laporan berkelanjutan merupakan cerminan kinerja organisasi dalam dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan yang dapat menjadi media bagi perusahaan untuk menginformasikan kinerja organisasinya kepada seluruh

pemangku kepentingan, yang nantinya dapat membantu organisasi untuk menetapkan tujuan, mengukur kinerja dan mengelola perubahan dalam rangka membuat operasi organisasi terus keberlanjutan (Sari *et al.*, 2017).

Nasir, Ilham dan Utara (2014) menyebutkan bahwa pengungkapan laporan berkelanjutan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya dari profitabilitas, *leverage*, likuiditas, aktivitas perusahaan dan *corporate governance*. Profitabilitas, *leverage*, dan likuiditas yang merupakan ukuran dari kemampuan para eksekutif dalam menciptakan tingkat keuntungan, perencanaan dalam pengelolaan keuangan dan tingkat resiko keuangan perusahaan seharusnya dapat dijadikan pertimbangan perusahaan dalam merancang program sosial dan pelestarian lingkungan yang diungkapkan dalam laporan berkelanjutan.

Konsep laporan berkelanjutan terletak pada konsep *triple bottom line* yang dikembangkan oleh Elkington dalam Natalia (2016 : 4) yang menjelaskan *triple bottom line* yaitu “*The three lines of the triple bottom line represent society, the economy and the environment. Society depend on the global ecosystem, whose health represents the ultimate bottom line. The three lines are not stable, they are in constant flux, due to social political, economic and environmental pressures, cycle and conflicts.*” John Elkington pada tahun 1997 melalui bukunya “*Cannibals with Fork, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*”. Elkington mengembangkan konsep *triple bottom line* dalam istilah *economic prosperity, environmental quality dan social justice*. Elkington memberikan pandangan bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan, harus memperhatikan “3P”. Selain mengejar profit, perusahaan juga mesti memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (people) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet).

#### 2.1.5. *Global Reporting Initiative (GRI)*

Dalam *GRI – Standards 2016* terdapat dua jenis standar, yaitu pengungkapan umum dan pengungkapan khusus. Pengungkapan umum berisi tentang strategi dan analisis perusahaan, profil perusahaan, identifikasi aspek material bagi perusahaan, hubungan dengan pemangku kepentingan, prinsip

pelaporan dan tata kelola perusahaan. Pengungkapan khusus mengenai kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, kinerja sosial.

Didalam *GRI Standards 2016* terdapat prinsip-prinsip pelaporan. Adapun prinsip pelaporan itu untuk menentukan isi laporan dan untuk menentukan kualitas laporan.

a. Adapun prinsip pelaporan untuk menentukan isi laporan antara lain :

1. Inklusivitas pemangku kepentingan atau organisasi

Pelapor harus mengidentifikasi para pemangku kepentingannya, dan menjelaskan cara organisasi menanggapi ekspektasi dan kepentingan yang masuk akal dari para pemangku kepentingan.

2. Konteks keberlanjutan

Laporan harus menyajikan kinerja organisasi pelapor dalam konteks keberlanjutan yang lebih luas.

3. Materialitas

Mencerminkan dampak sosial, lingkungan, ekonomi signifikan organisasi pelapor atau secara substansial memengaruhi penilaian dan keputusan dari para pemangku kepentingan konteks keberlanjutan.

4. Kelengkapan

Laporan harus menyertakan cakupan topik material dan batasannya yang cukup untuk mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan, dan untuk menilai kinerja organisasi pelapor dalam periode pelaporan.

b. Adapun prinsip pelaporan untuk menentukan kualitas laporan antara lain :

1. Akurasi

Informasi yang dilaporkan harus cukup akurat dan terperinci bagi para pemangku kepentingan untuk menilai kinerja organisasi pelapor.

2. Keseimbangan

Informasi yang dilaporkan harus mencerminkan aspek positif dan negatif dari kinerja organisasi pelapor untuk memungkinkan penilaian beralasan atas kinerja secara keseluruhan.

3. Kejelasan

Organisasi pelapor harus membuat informasi yang tersedia dengan cara yang dapat dimengerti dan dapat diakses oleh para pemangku kepentingan yang menggunakan informasi tersebut

#### 4. Keterbandingan

Organisasi pelapor harus memilih, menyusun, dan melaporkan informasi secara konsisten. Informasi yang dilaporkan harus disajikan dengan cara yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk menganalisis perubahan kinerja organisasi dari waktu ke waktu, dan yang bisa mendukung analisis relatif terhadap organisasi lainnya.

A. Standar Universal atau standar umum seri 100 antara lain :

1. GRI 101 berisi landasan atau titik awal untuk penggunaan rangkaian Standar GRI. GRI 101 menetapkan prinsip-prinsip pelaporan untuk menentukan isi dan mutu laporan.
2. GRI 102 berisi pengungkapan umum yang digunakan untuk melaporkan informasi kontekstual tentang sebuah organisasi dan praktik pelaporan keberlanjutannya. Ini termasuk informasi tentang profil, strategi, etika dan integritas, tata kelola, praktik keterlibatan pemangku kepentingan, proses pelaporan organisasi.
3. GRI 103 berisi pendekatan manajemen yang digunakan untuk melaporkan informasi tentang bagaimana sebuah organisasi mengelola topik material.

B. Standar topik spesifik yaitu Seri 200 (Topik ekonomi), Seri 300 (Topik lingkungan), Seri 400 (Topik Sosial). Adapun penjabaran pengungkapan dari masing-masing Seri dalam GRI diantaranya :

1. Pengungkapan Seri 201 Kinerja ekonomi
  - a. Pengungkapan 201-1 Nilai ekonomi yang dihasilkan dan didistribusikan.
  - b. Pengungkapan 201-2 Implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim.
  - c. Pengungkapan 201-3 Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya.
  - d. Pengungkapan 201-4 Bantuan finansial yang diterima oleh pemerintah.
2. Pengungkapan Seri 202 Keberadaan pasar

- a. Pengungkapan 202-1 Rasio standar upah karyawan *entry-level* berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional.
- b. Proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat lokal.
3. Pengungkapan Seri 203 Dampak ekonomi tidak langsung
  - a. Pengungkapan 203-1 Investasi infrastruktur dan dukungan layanan.
  - b. Pengungkapan 203-2 Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan.
4. Pengungkapan Seri 204 Praktik pengadaan
  - Pengungkapan 204-1 Proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal.
5. Pengungkapan Seri 205 Anti korupsi
  - a. Pengungkapan 205-1 Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi.
  - b. Pengungkapan 205-2 Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti korupsi.
  - c. Pengungkapan 205-3 Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil.
6. Pengungkapan Seri 206 Perilaku anti persaingan
  - Pengungkapan 206-1 Langkah-langkah hukum untuk perilaku anti persaingan, praktik anti *trust* dan monopoli.
7. Pengungkapan Seri 301 Material
  - a. Pengungkapan 301-1 Material yang digunakan berdasarkan berat atau volume.
  - b. Pengungkapan 301-2 Material input dari daur ulang yang digunakan.
  - c. Pengungkapan 301-3 Produk *reclaimed* dan material kemasannya.
8. Pengungkapan Seri 302 Energi
  - a. Pengungkapan 302-1 Konsumsi energi dalam organisasi.
  - b. Pengungkapan 302-2 Konsumsi energi diluar organisasi.
  - c. Pengungkapan 302-3 Intensitas energi.
  - d. Pengungkapan 302-4 Pengurangan konsumsi energi.
  - e. Pengungkapan 302-5 Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa.
9. Pengungkapan Seri 303 Air
  - a. Pengungkapan 303-1 Pengambilan air berdasarkan sumber.

- b. Pengungkapan 303-2 Sumber air yang signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air.
  - c. Pengungkapan 303-3 Daur ulang dan penggunaan air kembali.
10. Pengungkapan Seri 304 Keanekaragaman hayati
- a. Pengungkapan 304-1 Lokasi operasi yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung.
  - b. Pengungkapan 304-2 Dampak signifikan dari kegiatan, produk, dan jasa pada keanekaragaman hayati.
  - c. Pengungkapan 304-3 Habitat yang dilindungi atau direstorasi.
  - d. Pengungkapan 304-4 Spesies daftar merah IUCN dan spesies daftar konservasi nasional dengan habitat dalam wilayah yang terkena efek operasi.
11. Pengungkapan Seri 305 Emisi
- a. Pengungkapan 305-1 Emisi GRK Cakupan 1 langsung.
  - b. Pengungkapan 305-2 Emisi energi GRK Cakupan 2 tidak langsung.
  - c. Pengungkapan 305-3 Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya.
  - d. Pengungkapan 305-4 Intensitas emisi GRK.
  - e. Pengungkapan 305-5 Pengurangan emisi GRK.
  - f. Pengungkapan 305-6 Emisi zat perusak ozon (ODS).
  - g. Pengungkapan 305-7 Nitrogen Oksida (NO<sub>x</sub>), sulfur oksida (SO<sub>x</sub>), dan emisi udara signifikan lainnya.
12. Pengungkapan Seri 306 Air limbah (efluen) dan Limbah
- a. Pengungkapan 306-1 Pelepasan air berdasarkan mutu dan tujuan.
  - b. Pengungkapan 306-2 Limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan.
  - c. Pengungkapan 306-3 Tumpahan yang signifikan.
  - d. Pengungkapan 306-4 Pengangkutan limbah berbahaya.
  - e. Pengungkapan 306-5 Badan air yang dipengaruhi oleh pelepasan dan/atau limpahan air.
13. Pengungkapan Seri 307 Kepatuhan lingkungan
- Pengungkapan 307-1 Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup.

14. Pengungkapan Seri 308 Penilaian lingkungan pemasok
  - a. Pengungkapan 308-1 Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan.
  - b. Pengungkapan 308-2 Dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil.
15. Pengungkapan Seri 401 Kepegawaian
  - a. Pengungkapan 401-1 Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan.
  - b. Pengungkapan 401-2 Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu.
  - c. Pengungkapan 401-3 Cuti melahirkan.
16. Pengungkapan Seri 402 Hubungan tenaga kerja  
Pengungkapan 402-1 Periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional.
17. Pengungkapan Seri 403 Kesehatan dan keselamatan kerja
  - a. Pengungkapan 403-1 Perwakilan pekerja dalam komite resmi gabungan manajemen-pekerja untuk kesehatan dan keselamatan.
  - b. Pengungkapan 403-2 Jenis kecelakaan kerja dan tingkat kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, hari kerja yang hilang, dan ketidakhadiran, serta jumlah kematian terkait pekerjaan.
  - c. Pengungkapan 403-3 Para pekerja dengan risiko kecelakaan atau penyakit berbahaya tinggi terkait dengan pekerjaan mereka.
  - d. Pengungkapan 403-4 Topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian resmi dengan serikat buruh.
18. Pengungkapan Seri 404 Pelatihan dan pendidikan
  - a. Pengungkapan 404-1 Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan.
  - b. Pengungkapan 404-2 Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan.
  - c. Pengungkapan 404-3 Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier.
19. Pengungkapan Seri 405 Keanekaragaman dan kesempatan setara

- a. Pengungkapan 405-1 Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan.
- b. Pengungkapan 405-2 Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki.
- 20. Pengungkapan Seri 406 Non - diskriminasi
  - Pengungkapan 406-1 Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan.
- 21. Pengungkapan Seri 408 Pekerja anak
  - Pengungkapan 408-1 Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak.
- 22. Pengungkapan Seri 409 Kerja paksa atau wajib kerja
  - Pengungkapan 409-1 Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja.
- 23. Pengungkapan Seri 410 Praktik keamanan
  - Pengungkapan 410-1 Petugas keamanan yang dilatih mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia.
- 24. Pengungkapan Seri 411 Hak – hak masyarakat adat
  - Pengungkapan 411-1 Insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat.
- 25. Pengungkapan Seri 412 Penilaian hak asasi manusia
  - a. Pengungkapan 412-1 Operasi-operasi yang telah melewati tinjauan hak asasi manusia atau penilaian dampak.
  - b. Pengungkapan 412-2 Pelatihan karyawan mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia.
  - c. Pengungkapan 412-3 Perjanjian dan kontrak investasi signifikan yang memasukkan klausul-klausul hak asasi manusia atau yang telah melalui penyaringan hak asasi manusia.
- 26. Pengungkapan Seri 413 Masyarakat lokal
  - a. Pengungkapan 413-1 Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan.
  - b. Pengungkapan 413-2 Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal.

27. Pengungkapan Seri 414 Penilaian sosial pemasok
  - a. Pengungkapan 414-1 Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria sosial.
  - b. Pengungkapan 414-2 Dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil.
28. Pengungkapan 415 Kebijakan publik
  - Pengungkapan 415-1 Kontribusi publik
29. Pengungkapan 416 Kesehatan dan keselamatan pelanggan
  - a. Pengungkapan 416-1 Penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk dan jasa.
  - b. Pengungkapan 416-2 Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa.
30. Pengungkapan 417 Pemasaran dan pelabelan
  - a. Pengungkapan 417-1 Persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa.
  - b. Pengungkapan 417-2 Insiden ketidakpatuhan terkait pelabelan dan informasi produk dan jasa.
  - c. Pengungkapan 417-3 Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran.
31. Pengungkapan 418 Privasi pelanggan
  - Pengungkapan 418-1 Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan.
32. Pengungkapan 419 Kepatuhan sosial ekonomi
33. Pengungkapan 419-1 Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan di bidang sosial dan ekonomi

#### 2.1.6. Kinerja Keuangan

Fahmi (2012 : 2) menyatakan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan dengan baik dan benar. Menurut Jumingan (2011 : 239) kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu diukur dengan

indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas perusahaan. Menurut Mahmudi (2010 : 87) keberhasilan kinerja dapat dinilai dari aspek ekonomi terkait dengan ketercapaian target. Pentingnya analisis kinerja perusahaan Menurut Jumingan (2011 : 239) memiliki tujuan yaitu :

- a. Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan perusahaan terutama kondisi likuidasi, kecukupan modal dan profitabilitas yang dicapai dalam tahun berjalan maupun tahun sebelumnya.
- b. Untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan semua aset yang dimiliki dalam menghasilkan profit secara efisien.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007, 4) analisis kinerja keuangan bermanfaat untuk memprediksi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada dan bermanfaat dalam perumusan pertimbangan tentang efektivitas perusahaan.

#### 2.1.7. Profitabilitas

Profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan manajemen perusahaan (Brigrham & Houston, 2009). Dengan demikian dapat dikatakan profitabilitas perusahaan merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari aktivitas yang dilakukan pada periode akuntansi. Seringkali pengamatan menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi atas investasi perusahaan yang memperoleh laba yang besar, maka dapat dikatakan berhasil atau memiliki kinerja yang baik, sebaliknya kalau laba yang diperoleh perusahaan relatif kecil atau menurun dari periode sebelumnya, maka dapat dikatakan perusahaan kurang berhasil atau memiliki kinerja yang kurang baik.

Laba yang menjadi ukuran kinerja perusahaan harus dievaluasi dari suatu periode ke periode berikutnya dan bagaimana laba aktual dibandingkan dengan laba yang direncanakan. Apabila seorang manajer telah bekerja keras dan berhasil meningkatkan penjualan sementara biaya tidak berubah, maka laba harus meningkat melebihi periode sebelumnya yang mengisyaratkan keberhasilan.

Menurut Sartono Agus dalam buku Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi Edisi 4 Rasio profitabilitas ini menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Semakin tinggi nilai persentase rasio profitabilitas, semakin baik perusahaan. Adapun rasio – rasio tersebut antara lain :

1. *Net Profit Margin*

Menurut Sartono Agus dalam buku Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi Edisi 4 *Net Profit Margin* merupakan rasio yang dapat mengukur suatu tingkat keuntungan dalam mengelola perusahaan pada tingkat penjualan. Apabila *gross profit margin* selama satu periode tidak berubah sedangkan *net profit margin* mengalami penurunan maka berarti bahwa biaya meningkat relatif lebih besar daripada peningkatan penjualan. Menurut Sitanggang (2014 : 29) menyatakan bahwa rasio tersebut digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat keuntungan bersih perusahaan dari setiap penjualannya, artinya rasio ini telah memperhatikan biaya operasi, bunga dan pajak perusahaan.

Rumus *Net Profit Margin* :

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

2. *Return On Equity*

Menurut Sartono Agus dalam buku Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi Edisi 4 *Return On Equity* (rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi para pemegang saham perusahaan). rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang tersedia bagi para pemegang saham perusahaan. Rasio ini juga dipengaruhi oleh besar kecilnya hutang perusahaan, apabila proporsi hutang makin besar maka rasio ini juga akan makin besar.

Rumus *Return on Equity* :

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

3. *Return on Asset*

*Return on Asset* (ROA) rasio untuk mengetahui kemampuan manajemen perusahaan dalam menghasilkan laba bersih melalui semua kemampuan sumber aset yang dimilikinya. Menurut Lestari dan Nugroho (2010) rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari seluruh kemampuan sumber aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Semakin tinggi rasio tersebut, maka semakin efektif penggunaan aktiva tersebut.

Rumus *Return on Asset* :

$$\text{Return on Asset} = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

## 2.2. Telaah Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1** Penelitian mengenai hubungan tata kelola, laporan berkelanjutan dan kinerja keuangan

No	Penelitian	Hasil Penelitian
1	Prabowo <i>et al.</i> , (2018)	Proporsi dewan komisaris memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan, sedangkan dewan direktur, ukuran perusahaan, <i>debt to equity ratio</i> memberikan dampak negatif terhadap kinerja keuangan.
2	Olayiwola (2018)	Ukuran dewan dengan <i>Net Profit Margin</i> (NPM) memberikan dampak negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, lalu komposisi dewan dengan <i>Net Profit Margin</i> (NPM) memberikan dampak positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan sedangkan ukuran komite audit dengan <i>Net Profit Margin</i> (NPM) memberikan dampak yang tidak signifikan dan ukuran dewan, komposisi dewan dan

		komite audit kombinasi ketiganya mempunyai hubungan yang signifikan terhadap <i>Net Profit Margin</i> (NPM).
3	Erika <i>et al.</i> , (2019)	Ukuran perusahaan dan persentase dari dewan komisaris independen tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan, sementara ukuran dewan, deviden dan <i>Financial leverage</i> semua berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
No	Penelitian	Hasil penelitian
4	Nnamani <i>et al.</i> , (2017)	Laporan berkelanjutan memberikan dampak positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.
5	Clarissa dan Rasmini (2018)	Hubungan antara pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan terhadap kinerja keuangan berdasarkan teori legitimasi adalah positif dan signifikan, tetapi hubungan pengungkapan kinerja ekonomi terhadap kinerja keuangan perusahaan adalah negatif dan signifikan berkaitan dengan adanya <i>managerial opportunistic</i> .
6	Kasbun <i>et al.</i> , (2016)	Laporan keberlanjutan (Ekonomi, sosial dan lingkungan) memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan yang diukur menggunakan <i>Return on Asset</i> (ROA) dan <i>Return on Equity</i> (ROE).

### 2.3. Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dan tinjauan pustaka, maka variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat dirumuskan melalui suatu kerangka pemikiran pada Gambar 2.1.

## **2.4. Pengembangan Hipotesis**

Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu dan berdasarkan kerangka pemikiran maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **2.4.1. Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan**

Komite audit merupakan komite penunjang dewan komisaris yang bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen (KNKG, 2006). Komite audit diukur dengan jumlah anggota komite audit yang dimiliki perusahaan (Noviawan dan Septiani, 2013).

Jumlah anggota komite audit yang cukup dan sesuai dengan kompleksitas perusahaan akan membantu peningkatan efektifitas pengambilan keputusan. Komite audit yang lebih besar akan meningkatkan jumlah rapat dan menghasilkan lebih banyak lagi pengawasan yang efektif (Raghunandan *et al.*, 2001). Rezaei dan Abbasi (2015) menunjukkan bahwa ukuran komite audit perusahaan mempengaruhi kinerja perusahaan. Ukuran komite audit akan mempengaruhi kinerja perusahaan melalui adanya lebih banyak spesialis dengan berbeda pengetahuan dan ide-ide dalam komite audit dapat mengontrol keakuratan teknik akuntansi dan meningkatkan tingkat kinerja ekonomi perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H1a : Komite Audit berpengaruh positif terhadap NPM
- H1b : Komite Audit berpengaruh positif terhadap ROA
- H1c : Komite Audit berpengaruh positif terhadap ROE

#### **2.4.2. Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan**

Dewan komisaris independen dapat meningkatkan fungsi pengawasan pada perusahaan. Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007, pada pasal 108 ayat (5) dijelaskan bahwa bagi perusahaan berbentuk perseroan Terbatas, maka wajib memiliki paling sedikitnya 2 (dua) anggota Dewan Komisaris. Dewan Komisaris terdiri dari komisaris independen dan komisaris non independen. Komisaris independen merupakan komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi, sedangkan komisaris non-independen merupakan komisaris yang terafiliasi. Yang dimaksud dengan terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Mantan anggota direksi dan dewan komisaris yang terafiliasi serta karyawan perusahaan, untuk jangka waktu tertentu termasuk dalam kategori terafiliasi (KNKG, 2006). Komisaris Independen diatur dalam peraturan 12 BAPEPAM No: KEP-315/BEJ/06-2000 yang disempurnakan dengan keputusan No:KEP-339/BEJ/07-2001 yang menyatakan bahwa setiap perusahaan publik wajib memiliki komisaris independen untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik.

Adanya komisaris independen diharapkan mampu meningkatkan peranan dewan komisaris sehingga tercipta *good corporate governance* dalam suatu perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Salsabila dan Muhammad Saifi (2017), Yulia dan P. Basuki (2014) yang menunjukkan komisaris independen memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (NPM).

Adanya dewan komisaris independen dalam perusahaan dapat mengurangi masalah keagenan dan mencegah terjadinya perilaku oportunistik. Puspitasari dan Ernawati (2010) yang menyatakan bahwa, dewan komisaris dengan lebih banyak anggota independen cenderung akan memberikan pemantauan yang lebih baik terhadap kebijakan-kebijakan manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan (*ROA*). Berdasarkan hasil ini maka dapat dikatakan bahwa Komisaris Independen berpengaruh terhadap *return on asset*.

Terdapat pengaruh dijelaskan, semakin besar proporsi komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan dengan keahlian dan pengalaman yang beragam, akan memungkinkan menyebabkan kenaikan kemampuan komisaris independen dalam melakukan pengawasan karena muncul masalah koordinasi, komunikasi dan pembuatan keputusan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Helfina *et al.*, (2016), yang menyatakan bahwa Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Return On Asset*.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33/POJK.04/2014 (OJK, 2014) menyatakan bahwa dewan komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan harus sesuai dengan ketentuan anggaran serta memberi nasihat kepada dewan direksi. Yasser (2011) menemukan bahwa jumlah komisaris independen yang lebih besar dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan karena komisaris independen dapat meningkatkan efektivitas perusahaan dan juga dapat mencegah terjadinya *agency problem* yang dapat terjadi di perusahaan. Organisasi mampu menjalankan fungsinya masing-masing secara efisien dan efektif. Hal ini disebabkan oleh peran dari komisaris independen yang bersikap netral dan dapat menjadi penengah dalam memecahkan masalah diantara pemegang saham yang mengalami konflik kepentingan. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Tetty dan Imam (2012) yang menunjukkan bahwa ada pengaruh positif yang artinya semakin tinggi komisaris independen akan dapat meningkatkan tingkat profitabilitas perusahaan (ROE). Dewan komisaris memainkan peran penting dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik karena dewan ini adalah inti dari tata kelola perusahaan untuk memastikan implementasi strategi perusahaan, untuk mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan dan mewajibkan akuntabilitas yang efektif. Sehingga kinerja proporsi pengurus independen, jumlah komisaris, keuntungan perusahaan juga akan semakin meningkat.

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H2a : Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap NPM

H2b : Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap ROA

H2c : Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap ROE

#### **2.4.3. Laporan Berkelanjutan Terhadap Kinerja Keuangan**

Semakin tinggi indeks pengungkapan SR yang dilakukan perusahaan, berpengaruh secara signifikan pada peningkatan net profit margin (NPM) yang diperoleh perusahaan. Dengan perusahaan melaksanakan SR maka akan meningkatkan biaya yang tinggi sehingga mengakibatkan NPM menurun. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Candrayanthi dan Saputra (2013) yang menyatakan adanya hubungan yang kuat antara pengungkapan SR terhadap NPM.

Fungsi dari laporan keberlanjutan yaitu untuk memberikan informasi cerminan kinerja organisasi dalam bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Laporan berkelanjutan adalah sebuah bukti pertanggungjawaban perusahaan terhadap para pemangku kepentingan dan membuktikan bahwa perusahaan memiliki batasan dalam peraturan yang telah dibuat. Perusahaan memerlukan laporan berkelanjutan untuk mendapatkan kepercayaan para stakeholder, karena dalam aktivitas bisnis perusahaan sangat memerlukan kepercayaan dari para stakeholder. Kepercayaan yang berasal dari para pemangku kepentingan berupa investasi, melakukan kerjasama yang dapat meningkatkan produktivitas dan penjualan perusahaan. Hal ini dapat memberikan pengaruh pada tingkat laba bersih perusahaan, dimana meningkatnya laba bersih perusahaan akan meningkatkan nilai ROA pada perusahaan. Apabila nilai ROA mengalami peningkatan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja perusahaan meningkat.

Menurut Susanto dan Tarigan (2013) menyimpulkan bahwa pengungkapan laporan berkelanjutan memiliki hubungan yang signifikan dan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Hal ini dapat membuktikan bahwa laporan berkelanjutan dapat memberi pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, karena semakin terpenuhinya indeks pengungkapan maka kinerja perusahaan juga akan meningkat.

Dimensi sosial berkelanjutan menyangkut dampak sebuah organisasi pada sistem sosial itu beroperasi. Kinerja tenaga kerja dan pekerjaan layak yang akan dibagi menjadi empat aspek yaitu praktek tenaga kerja dan pekerjaan yang layak, hak asasi manusia, masyarakat, dan tanggungjawab produk. Informasi yang akan diungkapkan akan sama seperti kinerja ekonomi dan kinerja lingkungan dimana terdiri dari pendekatan manajemen, tujuan, kebijakan, tanggungjawab pelatihan, organisasi dan kesadaran, monitoring dan tindak lanjut, dan informasi kontekstual tambahan. Semuanya akan dilaporkan berdasarkan hubungan aspek sosial (GRI, Keberlanjutan Pedoman Pelaporan).

Dimensi lingkungan (EN) berkelanjutan adalah dampak yang dihasilkan melalui aktifitas produksi perusahaan terhadap lingkungan yang meliputi bahan yang digunakan, energi dan konsumsinya, ekosistem, tanah, udara dan air dan konsumsinya, pembuangan emisi pelepasan limbah (cair, padat, gas), transport. Maka dari itu perlunya diungkapkan *sustainability report* untuk menjawab tuntutan dari para *stakeholder*. Sehingga *stakeholder* dapat mengetahui kinerja perusahaan yang peduli akan lingkungan dan dapat memberikan respon positif dengan memberikan pendanaan bagi perusahaan yang akan digunakan untuk meningkatkan produksi dan penjualan sehingga dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan.

Menurut Nnamani *et al.*, (2017) menyatakan bahwa laporan berkelanjutan memberi dampak positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan dari sudut pandang *stakeholder*. Hasil penelitian Kasbun *et al.*, (2016) menyatakan laporan berkelanjutan (ekonomi, sosial dan lingkungan) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan diukur menggunakan *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE). Hal ini menunjukkan bahwa diduga laporan berkelanjutan memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H3a : Pengungkapan Indeks Laporan Berkelanjutan berpengaruh positif terhadap NPM

H3b : Pengungkapan Indeks Laporan Berkelanjutan berpengaruh positif terhadap ROA

H3c : Pengungkapan Indeks Laporan Berkelanjutan berpengaruh positif terhadap ROE

Berdasarkan penjelasan diatas, maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan pada gambar 2.1 berikut

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

